



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNI SYAM
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 6355

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.352.593.000**

1. Tanah Seluas 1690 m2 di LIMA PULUH KOTA, WARISAN Rp. 2.873.000
2. Tanah Seluas 1300 m2 di LIMA PULUH KOTA, WARISAN Rp. 39.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/80 m2 di LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 34.320.000
4. Tanah Seluas 7460 m2 di LIMA PULUH KOTA, WARISAN Rp. 373.000.000
5. Tanah Seluas 2505 m2 di LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 75.150.000
6. Tanah Seluas 1950 m2 di LIMA PULUH KOTA, WARISAN Rp. 0
7. Tanah Seluas 1500 m2 di LIMA PULUH KOTA, WARISAN Rp. 45.000.000
8. Tanah Seluas 2665 m2 di LIMA PULUH KOTA, WARISAN Rp. 133.250.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/59 m2 di LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 250.000.000**



1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 25.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 540.107.308

F. HARTA LAINNYA Rp. 45.500.000

Sub Total Rp. 2.288.200.308

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.288.200.308

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.